

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN SELUMA

Diana Puspita, Fadli, Halimatusyadiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aimed to examine the effect of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Understanding of Government Accounting Standards and Internal Control Systems on the Quality of Regional Financial Reports. This research is a type of research with a quantitative approach to survey methods. The sample in this study was 29 Regional Apparatus of Seluma Regency. Sampling of respondents in this study is based on the census method. The respondents from each Regional Apparatus are financial administration officials, treasurers, and financial administration staff at agencies, offices, offices, sub-districts, and regional secretaries. The results showed that Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Understanding of Government Accounting Standards and Internal Control Systems on the Quality of Regional Financial Reports. Keyword: Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Understanding of Government Accounting Standards and Internal Control Systems, Quality of Regional Financial Reports.

Keywords: Human, Utilization, Understanding Accounting and Internal Control, Quality.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, baik dari aspek sistem pengendalian internal maupun terhadap kepatuhan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan sebagai media mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, laporan keuangan menggambarkan kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan karakteristik kualitas suatu laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normatif yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintahan bisa memberikan kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, pemerintahan daerah bertanggungjawab untuk menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya adalah SDM. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi". Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi, merupakan sesuatu hal yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan. Berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Menurut Komarasari (2016) kapasitas memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal jika masih belum didukung dengan teknologi informasi. Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Kualitas laporan keuangan pemerintah berhubungan erat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem usaha atau sosial yang diterapkan oleh pemerintah yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan organisasi agar melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan program perusahaan sehingga efisiensi dan kebijakan manajemen terpenuhi. Sistem pengendalian intern, yang baik apabila kecilnya terjadi penyimpangan. Untuk memperkecil peluang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang standar pengendalian internal pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan, penyelenggaraan pemerintahan negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengamanan aset negara.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- Untuk menguji pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
- Untuk menguji pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan.
- Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Stewardship

Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran dan hasil untuk kepentingan organisasi (Donaldson 1989 dan Davis. 1991).

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut Donaldson (1989) dalam teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia menempatkan individu yang berintegritas. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal, maka dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agent. Hal tersebut di dukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan et al. (1996) dan Slyke (2006).

Hasil penelitian Morgan et al. (1996) menunjukkan bahwa manager menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai steward daripada agent yang menyebabkan kinerja organisasi

dapat ditingkatkan. Hasil penelitian Slyke (2006) juga menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan lebih banyak bertindak sebagai steward karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif metode survey. Penelitian sekarang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey untuk menganalisis pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin di investigasi oleh peneliti (Ihsanti, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Kabupaten Seluma yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

Sampel dalam penelitian ini 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma. Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini didasarkan pada metode sensus. Oleh karena itu semua Perangkat Daerah dijadikan sampel penelitian. Adapun responden dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, dan Staf penatausahaan keuangan di sekretaris daerah, dinas, badan, dan kantor di Kabupaten Seluma.

3.3. Alat Analisis Data

Dalam analisis deskriptif ini akan dilakukan analisis data yaitu nilai kisaran teoritis, rata-rata teoritis, kisaran actual, rata-rata actual, standar deviasi, frekuensi dan persentase, sehingga diperoleh gambaran tentang Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan Daerah

3.4. Pengujian Hipotesis

Pengeujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$KLK = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan (KLK)

b₁ = Koefisien Variabel X₁

b₂ = Koefisien Variabel X₂

b₃ = Koefisien Variabel X₃

b₄ = Koefisien Variabel X₄

X₁ = Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM)

X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

X₃ = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

X₄ = Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan besarnya pengaruh dilakukan analisis hasil uji regresi linier berganda. Analisis hasil uji dilakukan terdiri dari tiga, yaitu:

- Uji kelayakan model (hasil uji F),
- Analisis hasil Uji koefisien determinasi (R^2), dan
- Analisis hasil uji t (uji hipotesis).

Adapun uraian dari analisis hasil uji regresi sebagai berikut.

- Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model) Uji kelayakan model dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis uji statistik F pada output hasil analisis regresi. Menurut Ghazali (2012) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika value atau nilai signifikansi menunjukkan nilai kurang dari 0,05, maka model yang digunakan layak.
- Koefisien Determinasi (R^2) Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi diinterpretasikan sebesar ($R^2 \times 100\%$) variasi dari variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan sisanya ($100\% - R^2 \times 100\%$) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghazali (2012) yang menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) dilihat dari nilai Adjusted R Square.
- Analisis Hasil Uji t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dengan menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi. Jika hipotesis masing-masing variabel bebas diterima apabila signifikansi atau p value $< 0,05$, sebaliknya jika masing-masing variabel bebas tidak signifikansi atau p value $> 0,05$ maka hipotesis penelitian ditolak (Ghozali, 2012). Untuk melihat arah pengaruh positif dan negatif dilihat dari Standardized Coefficients Beta.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Seluma. Uji kelayakan model dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis uji statistik F pada output hasil analisis regresi. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika F value atau nilai signifikansi menunjukkan nilai kurang dari 0,05, maka model yang digunakan layak dan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Table 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien t	t-hitung	Sig	Hasil
KSDM	0.112	1.110	0.047	Diterima
PTI	0.216	2.116	0.037	Diterima
PSAP	0.313	3.060	0.003	Diterima
SPI	0.129	1.252	0.041	Diterima
<i>R Square</i>			0.162	
Adjust R ²		0.121		
<i>F</i>		3.952		
<i>Sig</i>		0.006		

Berdasarkan Tabel 1, hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan uji statistik menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig } 0.006 < 0.05$. Artinya secara bersama-sama variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi diinterpretasikan sebesar ($R^2 \times 100\%$) variasi dari variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan sisanya ($100\% - R^2 \times 100\%$) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2012) yang menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) dilihat dari nilai Adjusted R Square.

Dari Tabel 1 diperoleh nilai R^2 (R Square) sebesar 0.121 (12,1%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebesar 12,1% dan sisanya 87.9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model atau diluar dari penelitian ini. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dengan menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012).

Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi. Jika hipotesis masing-masing variabel bebas diterima apabila signifikansi atau p value $< 0,05$, sebaliknya jika masing-masing variabel bebas tidak signifikansi atau p value $> 0,05$ maka hipotesis penelitian ditolak (Ghozali, 2012). Untuk melihat arah pengaruh positif dan negatif dilihat dari Standardized Coefficients Beta. Pada hasil penelitian dalam Tabel 4.9 terlihat bahwa nilai Sig < 0.05 , maka semua signifikan. Nilai variabel Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar $0.047 < 0.05$, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar $0.037 < 0.05$, dan nilai variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar $0.003 < 0.05$ serta nilai variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar $0.041 < 0.05$. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan uji statistik menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa secara sendiri-sendiri variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan dapat juga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja setiap pegawai dalam perusahaan maupun sebuah instansi. Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus, dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepadanya. Hasil penelitian sejalan Yuliani dan Agustini (2016) dan Yendrawati (2013) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Demikian pula, Rahmadani (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal. Morgan et al. (1996)

menyatakan bahwa manajer menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai steward daripada agent yang menyebabkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, stewards diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian sumber daya manusianya dan komitmen semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi yang tinggi, dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Wilkinson (1987) menjelaskan bahwa teknologi informasi untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan (internet) electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Menurut Jurnal dan Supomo (2002) teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Dalam hal ini teknologi informasi mampu menghasilkan atau mendukung laporan keuangan yang berkualitas. Setyowati (2016) menyatakan pemanfaatan sistem informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Pemerintah juga wajib menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai serta membangun jaringan sistem informasi manajemen untuk menyederhanakan akses antar unit kerja. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Rahmadani (2017) menemukan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian akuntansi atau keuangan telah melakukan pengelolaan data transaksi keuangan dengan menggunakan software yang sesuai dengan perundang-undangan. Laporan yang dihasilkan berasal dari sistem informasi yang telah terintegrasi, dengan adanya jadwal pemeliharaan secara teratur atau peralatan yang rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. Menurut Donaldson (1989) dalam teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia menempatkan individu yang berintegritas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang makin efektif. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Bila Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengalami peningkatan, maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan semakin meningkat searah dengan peningkatan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut Wahyono (2004) menyatakan dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang

dihasilkan serta sumberdaya yang menghasilkannya. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Hal didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) ada pengaruh pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Hal sesuai juga dengan kajian penelitian Rahmadani (2017) yang dalam penelitiannya menemukan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Donaldson (1989) dalam teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia menempatkan individu yang berintegritas. Implikasi teori *stewardship* yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para pengelola anggaran diharapkan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi mereka sehingga sebagai Organisasi Perangkat Daerah dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Bila Sistem Pengendalian Intern mengalami peningkatan, maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan semakin meningkat searah dengan peningkatan Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia suatu organisasi serta sangat berperan penting dalam pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*). Permendagri No. 59 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan yang mencukupi dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dan keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara (Udiyanti, dkk, 2014).

Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu Mirnayanti (2013). Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Tanjung, 2008).

Temuan penelitian Rahmadani (2015) bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin baiknya pengendalian internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Hal ini, sejalan juga dengan kajian penelitian Yendrawati (2013) menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan. Walaupun sistem pengendalian intern yang telah diterapkan sudah bagus, tetapi pemerintah daerah belum menetapkan sistem pengendalian intern secara efektif, hal ini menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kembali hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Rahmadani (2017) menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal, maka dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agent. Hal tersebut di dukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan et al. (1996) bahwa manager menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai steward daripada agent yang menyebabkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, atasan akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, maka steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal ini disebabkan karena steward merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku principal merupakan pertimbangan yang rasional serta steward akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, artinya semakin berkualitas SDM, maka akan semakin berkualitas laporan keuangan.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya Kualitas laporan keuangan akan semakin baik dengan meningkatnya pemamfaatan teknologi informasi.
- Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan, artinya Semakin faham penegelola keuangan terhadap standar akuntansi keuangan maka akan semakin meningkatkan kullitas laporan keuangan.
- Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin bagus sitem pengendalian interen maka akan meningkatkan kullitas laporan keuangan.

5.2. Implikasi Hasil Penelitian

- Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dikarenakan semakin memahami dengan baik dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan masih seringnya laporan keuangan yang belum memberikan informasi secara lengkap dan seringkali dalam menyelesaikannya tidak tepat waktu.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dapat menambah Teknologi Informasi, sehingga pemanfaatan teknologi yang tinggi dalam menyusun laporan keuangan berdampak pada semakin akuratnya laporan keuangan yang dibuat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dapat lebih meningkatkan lagi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pengelola keuangan, sehingga dapat memahami bagaimana menyusun laporan keuangan yang berkualitas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma meningkatkan peran Sistem Pengendalian Intern, sehingga dengan meningkatkannya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Sistem Pengendalian Intern dapat mencegah terjadi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan.
- Hasil penelitian ini mendukung teori stewardship, dalam penelitian ini yaitu stewards dalam hal ini adalah para pengelola laporan keuangan diharapkan bekerja dengan sebaik baiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma

sebagai suatu lembaga pelayanan public yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan public dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat.

5.3. Saran

Kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma khususnya bagian pengelola keuangan dapat memperbaiki laporan keuangan secara lengkap yang mencakup informasi akuntansi dan dapat menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu, dikarenakan laporan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Selain itu kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan, mengingat pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan untuk melakukan kajian secara mendalam.

References

- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*, New York Academic Press, Vol. 50, pp. 179-211.
- Abdillah, Willy. (2012). *Motivation and Consequence of Individual's Involvement In Social Network Sites: A Study Of Social Computing Of Inter Collectivist Individualist Cultural Value*. Journal of Indonesian Economy and Business. Volume 27 Number 2
- Anjani, Putu Widya., dan Wirawati, Ni Gusti Putu. (2018). *Pengaruh Usia, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Efektivitas Pengguna Sistem Informasi Akuntansi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.22. No. 3. ISSN: 2302-8556.
- Braam, Geert. (2013). *Conceptually-Based Financial Reporting Quality Assessment. An Empirical Analysis on Quality Differences Between UK Annual Reports and US 10-K Reports*. NiCe Working Paper, Institute for Management Research Radboud: University Nijmegen.
- Chan, Syafruddin. (2003). *Relationship Marketing : Inovasi Pemasaran Yang Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Desmiyawati. (2014). *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada SKPD Penda Riau)*. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, ISSN 2337-4314.
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory Or Agency Theory: CEO Governance And Shareholder Returns*. Australian Journal Of Management, 16: 49-64.
- Donaldson, L., dan Davis, J.H. (1989). *CEO Governance And Shareholder Returns: Agency Theory Or Stewardship Theory*. Paper Presented At The Annual Meeting Of The Academy Of Management, Washington, DC.
- Ghazali, Imam. (2012). *Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Mamduh M dan Halim, Abdul. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ihsanti. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluah Kota)*. Jurnal Manajemen.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Indriasih, D. (2014). *The Effect of Government Apparatus Competence and the effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847.
- International Accounting Standard Board Committee Foundation. 2010. IFRS. International Accounting Reporting Standards. IASB, United Kingdom.
- Jensen dan Meckling, 1(976). *The Theory Of The Firm: Manajerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure*. Jurnal Of Financial anda Economics, 3,305-360.
- Jurnali, Tedy dan Supomo, Bambang. (2002). *Pengaruh Faktor-Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik*, Jurnal Riset Akuntansi, Indonesia, Vol.5 No 2.
- Kartika., Hans., Sinaga, Rosita Uli., Syamsul, Merliyan., dan Siregar, Sylvia Veronica. (2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat
- Kieso, E, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield. (2017). *Intermediate Accounting*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Komarasari, W. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)*. Repository UPY.
- Kurniawan, Sutoto, Indar. (2016). *Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 13, No. 1.
- Laudon. Kenneth C., (2006). *Management Information System, 10th ed*, Jakarta: Salemba Empat.

- Mahaputra, Rama. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No 2.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Martini, Dwi. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- McKeown, J.R., Jane F. Mutchler, and W. Hopwood. (1991). Toward an Explanation of Auditor Failure to Modify the Audit Reports of Bankrupt Companies. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Supplement: 1-13.
- Mirnyanti. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat). Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin. Diunduh dari (<http://repository.unha.s.ac.id>).
- Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Morgan, G, Edward, S, and Mikhail. (1996). *Clinical Anesthesiology*. New York: MC Graw Hill
- Nurillah dan Muid. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akunatsi*, Volume 3 Nomor.2 Tahun 2014.
- Obaidat, Ahmad N. (2007). Accounting Information Qualitative Characteristic Gap: Evidence from Jordan. *International Management Review* Vol.3 No.2.
- Padli (2017). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu. Tesis Program Studi Magister Manajemen. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri No. 59 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Romdhoni, Febrianto, Rais. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman, Faktor Sosial dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) Oleh Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rudianto. (2009). Pengantar akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sudiarianti, Ni Made. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015
- Saidin, Saidatur, Fauzi. (2007). Audit Committee Characteristics and Quality of Unaudited Financial Accounts. Diakses 10 Maret 2020 jam 11:28 AM. <http://eprints.usm.my/7837/1>.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods For Business*. Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, Istihika, Pratiwi Endah. (2010). Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi: Solusi untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi. PT. Raja. Grafindo Persada. Jakarta.
- Sitorus. (2009). *Sistem Pengembalian Manajemen*. Bogor: BPKP.
- Sudarmanto, (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Slyke, Van. (2006). Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, No. 17.
- Suardjono. (2016). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyono, Teguh. (2004). *Sistem Informasi (Konsep Dasar, Analisis, Desain dan Implementasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wilkinson, C. Kneer, (1987). *Information Sistem For Accounting And Management, Concept, Applications, Technology: Essential Concept And Application*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Usa
- Williams dan Sawyer. (2003). *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications*. London: Career Education
- Yendrawati, Reni. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal AAI* Vol. 17 No.2 Universitas Islam Yogyakarta
- Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Volume 14, No. 1.
- Wungow, Jhon Fiesgrald., Lambey, Linda., Pontoh, Winston. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan Dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Urnal Akuntansi*, Vol. 1, No 1.